

KEPEMIMPINAN TEKNOKRATIS XI JINPING DALAM MOBILISASI IPTEK DAN REFORMULASI STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA

Lustia Budi, Yusep Priyanto, Tarsisius Susilo, Teguh Heri Susanto, Rudi Firmansah

Sekolah Staf dan Komando TNI

Email: lustiabudi48@gmail.com, Ysp_priyanto@yahoo.com, muchsus70@gmail.com, teguhherisusanto@gmail.com dan rufe99@yahoo.co.id

Abstract

Xi Jinping's leadership marks a transformation of China's strategic paradigm from ideological politics to technocratic governance oriented toward innovation in science and technology (S&T) as a foundation of national power. This study aims to analyze the characteristics of Xi's technocratic leadership in mobilizing science, technology, and the defense industry through the Innovation-Driven Development Strategy (IDDS) and civil-military fusion (CMF) policies, as well as to examine their implications for reformulating Indonesia's defense strategy and the digitalization of the Indonesian National Armed Forces (TNI). This research applies a qualitative descriptive approach using conceptual and policy analysis based on literature studies from academic sources and official documents. The findings show that Xi's leadership successfully integrates research, technology, industry, and high-quality human resources into a cohesive and adaptive defense innovation ecosystem. The reflection for Indonesia emphasizes the need to integrate research and strategic industries, strengthen digital defense systems, and develop technocratic human resources to achieve an intelligent and independent defense posture toward Indonesia Emas 2045.

Keyword: Civil-Military Fusion, Defense Strategy, Technocratic Leadership

Abstrak

Kepemimpinan Xi Jinping menandai transformasi paradigma strategis Tiongkok dari politik ideologis menuju kepemimpinan teknokratis yang berorientasi pada inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai kekuatan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter kepemimpinan teknokratis Xi dalam memobilisasi iptek dan industri pertahanan melalui kebijakan *Innovation-Driven Development Strategy* (IDDS) dan *civil-military fusion* (CMF), serta mengkaji implikasinya bagi reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konseptual dan kebijakan berbasis studi literatur dari sumber akademik dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Xi berhasil mengintegrasikan riset, teknologi, industri, dan sumber daya manusia unggul ke dalam ekosistem inovasi pertahanan yang adaptif dan berkelanjutan. Refleksi bagi Indonesia menekankan pentingnya integrasi riset dan industri strategis, penguatan sistem pertahanan digital, serta pembinaan

sumber daya manusia teknokratik guna mewujudkan pertahanan cerdas dan mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *Civil–Military Fusion, Kepemimpinan Teknokratis, Strategi Pertahanan,*

Diserahkan: 03-09-2025; Diterima: 10-10-2025; Diterbitkan: 20-10-2025

PENDAHULUAN

Perkembangan geopolitik global dalam dua dekade terakhir menunjukkan perubahan mendasar dalam distribusi kekuatan internasional, ditandai dengan meningkatnya peran Tiongkok sebagai aktor strategis yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Transformasi ini merupakan hasil dari strategi nasional yang berorientasi pada kemandirian teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok menggeser paradigma pembangunan dari ketergantungan global menuju kemandirian strategis berbasis inovasi. Pendekatan kepemimpinan ini berlandaskan pada rasionalitas teknokratis—yakni pengambilan kebijakan berdasarkan data, riset ilmiah, dan efisiensi kebijakan publik—sebagai fondasi pembangunan kekuatan nasional. Melalui visi besar *China Dream*, Xi menegaskan tujuan Tiongkok untuk mencapai status kekuatan dunia pada tahun 2049, bertepatan dengan seratus tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (Gao, 2023).

Kepemimpinan Xi menandai pergeseran fundamental dari orientasi ideologis menuju kepemimpinan teknokratis-transformatif, yang memadukan kemampuan manajerial berbasis ilmu pengetahuan dengan visi politik nasionalisme modern. Dalam konsep ini, sains dan teknologi bukan hanya sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi instrumen kekuatan nasional (*instrument of national power*). Dua kebijakan utama menjadi landasan dari paradigma tersebut, yaitu *Innovation-Driven Development Strategy* (IDDS) dan *Civil–Military Fusion* (CMF). Melalui IDDS, Xi menekankan bahwa inovasi ilmiah merupakan inti dari strategi pembangunan jangka panjang, sementara CMF menjadi mekanisme institusional untuk menyatukan potensi riset sipil dan militer dalam ekosistem pertahanan yang adaptif (Zheng & Liu, 2023).

Kebijakan *Made in China 2025* melengkapi strategi tersebut dengan menargetkan penguasaan teknologi tinggi pada sepuluh sektor strategis, termasuk kecerdasan buatan, sistem pertahanan siber, energi baru, dan robotika (RAND Corporation, 2022). Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa Xi menempatkan inovasi dan riset sebagai sumber legitimasi dan daya tawar politik Tiongkok di panggung internasional. Dalam konteks ini, kepemimpinan Xi menjadi cerminan model kepemimpinan transformasional yang menekankan perubahan struktural, visi jangka panjang, dan pembangunan nasional berbasis kompetensi. Bass (2006) menyebut bahwa kepemimpinan transformasional adalah kemampuan untuk menginspirasi pengikut agar melampaui kepentingan pribadi demi tujuan kolektif, sementara Heifetz (1994) menggambarkan kepemimpinan adaptif sebagai kemampuan mengarahkan perubahan dalam sistem sosial yang kompleks melalui pembelajaran institusional dan inovasi.

Selain dimensi transformasional dan adaptif, kepemimpinan Xi juga menunjukkan karakter strategis militer, sebagaimana dikemukakan oleh Lykke (1989), yaitu kemampuan mengoordinasikan *ends*, *ways*, dan *means* dalam mencapai keunggulan pertahanan jangka panjang. Dalam konteks ini, *ends* diwujudkan dalam visi *China Dream* untuk mencapai kekuatan nasional komprehensif; *ways* berupa strategi teknokratis dalam mengintegrasikan iptek dan industri pertahanan; dan *means* melalui mobilisasi riset, industri, dan sumber daya manusia unggul sebagai instrumen utama pertahanan nasional. Dengan demikian, kepemimpinan Xi mencerminkan konsolidasi kekuasaan berbasis inovasi, di mana efektivitas kebijakan pertahanan ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi dan kemampuan adaptasi terhadap perang masa depan berbasis kecerdasan buatan (*intelligentized warfare*) (Kania, 2022).

Dalam tataran global, strategi Tiongkok di bawah Xi Jinping juga memperlihatkan dimensi kompetitif terhadap tatanan internasional yang didominasi Amerika Serikat. Modernisasi militer, investasi pada teknologi pertahanan canggih, dan dominasi industri strategis seperti semikonduktor dan energi baru menjadi instrumen geopolitik baru dalam menegaskan posisi Tiongkok sebagai *techno-military power* (Medeiros, 2023). Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan Xi bukan hanya fenomena nasional, melainkan simbol transformasi struktur kekuasaan global yang berbasis pada keunggulan teknologi dan kemampuan inovasi.

Bagi Indonesia, model kepemimpinan Xi Jinping memiliki nilai reflektif yang signifikan. Dalam konteks pertahanan nasional, Indonesia menghadapi tantangan konvergensi antara ancaman militer dan nonmiliter, termasuk perang informasi, siber, dan ekonomi. Situasi ini menuntut kemampuan kepemimpinan yang integratif dan visioner dalam mengelola sumber daya manusia, teknologi, serta industri pertahanan nasional secara sinergis. Melalui pendekatan yang selaras dengan prinsip *civil-military integration*, Indonesia berpotensi memperkuat kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan BUMN industri strategis untuk membangun ekosistem pertahanan digital yang terintegrasi dan berdaya saing (Suryana & Panggabean, 2024).

Lebih jauh, arah transformasi pertahanan Indonesia perlu diarahkan pada pengembangan pertahanan digital adaptif melalui sistem *command, control, communication, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance* (C4ISR), serta penerapan kecerdasan buatan dalam analisis medan tempur. Upaya ini harus didukung oleh peningkatan literasi teknologi di kalangan prajurit dan penguatan kapasitas teknokratik dalam sistem pendidikan militer. Sinergi antara iptek, industri, dan SDM unggul akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan postur pertahanan cerdas dan mandiri di masa depan.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dalam mobilisasi iptek dan sumber daya nasional, serta menelaah relevansi dan implikasinya bagi reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi TNI. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan kajian kepemimpinan strategis di bidang pertahanan dan

kontribusi praktis dalam mendukung perumusan kebijakan pertahanan adaptif yang berorientasi pada inovasi dan teknologi menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis konseptual dan kebijakan (policy analysis) untuk memahami keterkaitan antara kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dalam mobilisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan implikasinya terhadap reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, konteks, dan rasionalitas di balik kebijakan strategis yang kompleks, bukan sekadar mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel (Creswell, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri pola berpikir, orientasi kebijakan, dan strategi mobilisasi sumber daya nasional yang diterapkan Xi, kemudian merefleksikannya terhadap kebutuhan transformasi pertahanan Indonesia (Gao, 2023).

Sumber data penelitian berasal dari studi literatur dan dokumen resmi, baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan topik kepemimpinan teknokratis, inovasi iptek, dan pertahanan negara. Data internasional mencakup dokumen strategis seperti *Made in China 2025*, *Innovation-Driven Development Strategy (IDDS)*, dan *China's National Defense White Paper* tahun 2019, serta laporan dari lembaga seperti RAND Corporation, CSIS, dan Jamestown Foundation yang mengulas modernisasi militer Tiongkok dan dinamika *civil–military fusion* (RAND Corporation, 2022; Medeiros, 2023). Dari sisi nasional, data diperoleh dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg), Strategi Pertahanan Negara (Strahanneg), serta publikasi akademik seperti *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* yang membahas arah transformasi pertahanan digital Indonesia (Suryana & Panggabean, 2024). Pemilihan seluruh sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema, kredibilitas, keterkinian data, dan kejelasan metodologi (Moleong, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen (documentary study) dengan menelusuri bahan pustaka, laporan kebijakan, dan penelitian terdahulu menggunakan basis data akademik seperti Scopus, Taylor & Francis Online, JSTOR, dan Google Scholar, serta portal resmi pemerintah seperti State Council of the PRC dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan kredibel, representatif, dan dapat diverifikasi.

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema utama, pola konseptual, dan hubungan antarvariabel yang berkaitan dengan kepemimpinan teknokratis, inovasi iptek, dan strategi pertahanan adaptif. Analisis dilakukan secara deduktif, menggunakan teori kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006), adaptif (Heifetz, 1994), dan strategis militer (Lykke, 1989) sebagai kerangka interpretatif. Ketiga teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana Xi mengintegrasikan inovasi teknologi, birokrasi teknokratik, dan kekuatan militer dalam membangun kemandirian strategis nasional.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yakni (1) karakteristik kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dan rasionalitas kebijakannya dalam memobilisasi iptek; (2) strategi integrasi riset, teknologi, industri pertahanan, dan sumber daya manusia unggul dalam kerangka *civil–military fusion*; serta (3) implikasi strategis model tersebut bagi reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi TNI (Zheng & Liu, 2023). Ketiga aspek ini dianalisis melalui triangulasi teori dan data dari berbagai sumber akademik dan kebijakan, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah mengenai hubungan antara kepemimpinan teknokratis dan modernisasi pertahanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan kajian kepemimpinan strategis pertahanan serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan transformasi pertahanan adaptif menuju Indonesia Emas 2045 (Suryana & Panggabean, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik, laporan kebijakan pertahanan, serta dokumen resmi Tiongkok dan Indonesia, ditemukan sejumlah temuan strategis yang relevan dengan topik penelitian. Kepemimpinan Xi Jinping yang bercorak teknokratis-strategis menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memobilisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), industri, serta sumber daya manusia sebagai instrumen utama pembangunan kekuatan nasional. Melalui kebijakan *civil–military fusion (CMF)*, Xi berhasil menciptakan ekosistem inovasi pertahanan yang menyinergikan sektor sipil dan militer secara efisien dan adaptif terhadap dinamika global (RAND Corporation, 2022).

Hasil analisis difokuskan pada tiga aspek utama: (1) karakteristik kepemimpinan teknokratis Xi Jinping serta rasionalitas kebijakannya dalam menjadikan iptek sebagai kekuatan nasional; (2) strategi integrasi riset, teknologi, industri pertahanan, dan sumber daya manusia unggul dalam kerangka *civil–military fusion* sebagai model pertahanan modern Tiongkok; dan (3) implikasi strategis model tersebut terhadap reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi TNI.

Kepemimpinan Xi Jinping mencerminkan sintesis antara rasionalitas teknokratis, kontrol politik terpusat, dan visi jangka panjang terhadap kemajuan nasional. Sebagai figur dengan pengalaman birokrasi yang luas dan pemahaman mendalam terhadap ilmu administrasi publik, Xi menempatkan iptek sebagai *strategic enabler* dalam seluruh dimensi pembangunan nasional (Gao, 2023). Xi menegaskan bahwa keunggulan teknologi merupakan inti dari kemandirian negara di tengah kompetisi global yang berbasis inovasi.

Salah satu ciri paling menonjol dari gaya kepemimpinannya adalah penerapan *scientific decision-making*, di mana kebijakan dirumuskan melalui analisis berbasis data, hasil riset, serta masukan ilmuwan dan teknokrat. Dalam *Innovation-Driven Development Strategy (IDDS)*, Xi menekankan bahwa “pengetahuan dan inovasi harus menggantikan tenaga kerja tradisional sebagai sumber utama produktivitas nasional” (Zheng & Liu,

2023). Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari kepemimpinan politik ideologis menuju kepemimpinan berbasis kompetensi ilmiah dan rasionalitas kebijakan.

Kebijakan *Made in China 2025* menjadi manifestasi konkret dari gaya teknokratis Xi, dengan fokus pada penguasaan sepuluh sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, bioteknologi, robotika, dan teknologi energi baru. Xi menilai bahwa kemandirian dalam sektor-sektor tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga meningkatkan keamanan nasional dan otonomi strategis Tiongkok (Medeiros, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006), di mana pemimpin mengubah visi menjadi struktur, kebijakan, dan hasil nyata yang mendorong transformasi institusional.

Lebih jauh, Xi menunjukkan kemampuan kepemimpinan adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Heifetz (1994), yaitu kemampuan mengelola perubahan dan berinovasi di tengah ketidakpastian global. Saat menghadapi tekanan ekonomi dan sanksi teknologi dari Amerika Serikat, Xi merespons dengan mempercepat inovasi domestik di sektor mikroprosesor, komunikasi 5G, dan kecerdasan buatan pertahanan. Strategi ini memperlihatkan kapasitas adaptif yang mampu mengubah tantangan eksternal menjadi momentum untuk penguatan nasional. Dengan demikian, kepemimpinan Xi dapat dikategorikan sebagai teknokratis-transformasional, karena berhasil menyelaraskan nilai ideologis Partai Komunis dengan efisiensi ilmiah dan integrasi pembangunan berbasis iptek (Kania, 2022).

Aspek kedua yang krusial dalam kepemimpinan Xi Jinping adalah kemampuannya mengintegrasikan riset, teknologi, industri pertahanan, dan sumber daya manusia unggul melalui kebijakan *civil-military fusion (CMF)*. Kebijakan ini menjadi inti dari program modernisasi pertahanan Tiongkok dan berfungsi sebagai *grand strategy* untuk memperkuat *defense-industrial complex* (RAND Corporation, 2022). Xi secara langsung memimpin Central Commission for Integrated Military and Civilian Development, yang dibentuk pada tahun 2017 untuk memastikan koordinasi lintas lembaga antara sektor riset sipil dan industri militer (Medeiros, 2023).

Model CMF mengedepankan konsep dual-use technology, yaitu pengembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil sekaligus pertahanan. Contohnya terlihat pada pengembangan kecerdasan buatan, big data, sensor optik, dan sistem navigasi satelit BeiDou yang digunakan untuk memperkuat logistik militer sekaligus mendukung industri sipil. Strategi ini memungkinkan Tiongkok mencapai *technological leapfrogging*—lompatan teknologi signifikan—tanpa melalui tahapan industrialisasi konvensional (Zheng & Liu, 2023).

Keterpaduan riset dan industri pertahanan diperkuat melalui lembaga-lembaga seperti *Chinese Academy of Sciences* (CAS) dan *National University of Defense Technology* (NUDT), yang menjadi simpul penghubung antara universitas, lembaga riset, dan industri strategis. Integrasi ini mewujudkan konsep *national innovation system* yang menempatkan ilmuwan dan teknokrat sebagai pilar utama pembangunan kekuatan nasional (Gao, 2023).

Selain fokus pada teknologi, Xi juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia unggul melalui *National Science and Technology Talent Development Plan (2021–2030)*. Program ini dirancang untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang siber, kecerdasan buatan, dan rekayasa sistem militer (Medeiros, 2023). Reformasi pendidikan di National Defense University of PLA pun diarahkan untuk meningkatkan literasi teknologi dan kesiapan dalam *multi-domain warfare*. Dengan demikian, Xi berhasil mengombinasikan hard power (industri pertahanan dan kekuatan militer) dengan soft power teknologi (riset dan inovasi), menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan pertahanan modern yang otonom, efisien, dan berbasis sains.

Model kepemimpinan teknokratis Xi Jinping memberikan refleksi strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kemandirian pertahanan dan mempercepat modernisasi TNI. Pertama, Indonesia perlu mengembangkan National Defense Innovation Ecosystem, yakni ekosistem kolaboratif antara Kementerian Pertahanan, TNI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta BUMN industri strategis seperti PT LEN, PT Pindad, dan PT Dahana. Sinergi ini harus diarahkan untuk mengintegrasikan hasil riset nasional dengan kebutuhan industri pertahanan, sejalan dengan prinsip *civil–military integration* yang diterapkan Tiongkok (Suryana & Panggabean, 2024).

Kedua, menghadapi era perang berbasis informasi, Indonesia perlu memperkuat pertahanan digital adaptif dengan memanfaatkan sistem *command, control, communication, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance* (C4ISR) yang berbasis kecerdasan buatan. Implementasi sistem ini akan meningkatkan efektivitas komando, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat interoperabilitas antar-matra. Kebijakan ini sejalan dengan arah *Defense Digital Roadmap 2045* dan *Transformasi TNI 2045*, yang menekankan sinergi teknologi informasi dalam sistem pertahanan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2023).

Ketiga, Indonesia perlu menekankan pembangunan SDM teknokratik pertahanan melalui reformasi pendidikan militer yang berorientasi pada sains dan teknologi. Kurikulum pendidikan di akademi dan sekolah staf perlu diperkuat dengan bidang keahlian seperti siber, intelijen digital, analisis data strategis, dan sistem pertahanan berbasis teknologi (Suryana & Panggabean, 2024). Pembentukan prajurit dan perwira dengan kapasitas teknokratik akan menjadi kunci terciptanya kepemimpinan militer yang adaptif dan inovatif.

Melalui adaptasi prinsip efisiensi teknokratis ala Xi, namun tetap berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai demokrasi, Indonesia dapat membangun postur pertahanan cerdas (*intelligent defense posture*) yang mandiri dan kompetitif di kawasan Indo-Pasifik. Model ini tidak hanya memperkuat daya tangkal nasional, tetapi juga memastikan bahwa strategi pertahanan Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan perang modern yang berbasis teknologi, informasi, dan kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis mendalam terhadap kebijakan serta strategi kepemimpinan Xi Jinping, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan teknokratis menjadi fondasi utama kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global berbasis inovasi dan teknologi pertahanan. Xi berhasil menggeser paradigma kepemimpinan tradisional yang berorientasi ideologis menuju model kepemimpinan yang mengedepankan rasionalitas ilmiah, efisiensi kebijakan, dan integrasi lintas sektor. Prinsip tersebut tercermin dalam implementasi *Innovation-Driven Development Strategy (IDDS), Made in China 2025*, dan *civil–military fusion (CMF)* yang menyatukan riset, industri pertahanan, serta pengembangan sumber daya manusia unggul ke dalam satu ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global.

Kepemimpinan Xi menampilkan karakter transformasional dan adaptif, di mana visi politik jangka panjang dikombinasikan dengan kemampuan membaca perubahan lingkungan strategis serta memanfaatkan teknologi sebagai alat kekuatan nasional. Ia tidak hanya memodernisasi militer Tiongkok melalui industrialisasi pertahanan, tetapi juga membangun sistem pengambilan keputusan berbasis data dan pengetahuan ilmiah. Pendekatan tersebut memungkinkan Tiongkok mengintegrasikan kekuatan sipil dan militer dalam satu kesatuan strategi pertahanan yang menekankan otonomi teknologi, kemandirian industri, serta penguasaan kecerdasan buatan dan teknologi siber sebagai komponen utama daya saing nasional.

Dari perspektif strategi pertahanan, keberhasilan modernisasi Tiongkok di bawah Xi menunjukkan bahwa kekuatan militer abad ke-21 tidak lagi diukur dari jumlah pasukan atau alutsista, melainkan dari kemampuan negara dalam mengelola iptek, data, dan sumber daya manusia unggul secara sistemik. Perang modern yang berorientasi pada *intelligentized warfare* dan *multi-domain operations* menuntut kemampuan adaptasi strategis dan kecepatan informasi, yang semuanya bertumpu pada kapasitas teknologi dan jaringan komando yang terintegrasi. Melalui kebijakan *civil–military fusion*, Tiongkok berhasil menggabungkan riset nasional, industri teknologi tinggi, dan sistem pertahanan negara dalam satu kerangka pembangunan kekuatan yang berkelanjutan.

Bagi Indonesia, model kepemimpinan teknokratis Xi Jinping memberikan pelajaran penting dalam memperkuat kemandirian dan transformasi pertahanan nasional. Pembentukan National Defense Innovation Ecosystem menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan lembaga riset, industri strategis, dan pendidikan militer ke dalam arah kebijakan yang selaras. Di sisi lain, transformasi digital TNI perlu dipercepat melalui penguatan sistem *Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR)* serta pengembangan kecerdasan buatan dalam mendukung operasi militer modern. Peningkatan kompetensi teknologis dan kapasitas teknokratik prajurit serta perwira menjadi prioritas agar pertahanan nasional mampu beradaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks.

Dengan mengadopsi prinsip efisiensi teknokratis, inovasi berkelanjutan, dan kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan, Indonesia dapat membangun model

Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping Dalam Mobilisasi Iptek Dan Reformulasi Strategi Pertahanan Indonesia

kepemimpinan pertahanan yang modern, adaptif, dan berkarakter Pancasila. Pendekatan tersebut akan memperkuat fondasi pertahanan nasional menuju *intelligent defense posture* yang mandiri, terintegrasi, dan kompetitif, sekaligus berkontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 — sebuah cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa maju, berdaulat, dan unggul dalam penguasaan teknologi pertahanan.

BIBLIOGRAFI

- Gao, J. (2023). Leadership and governance under Xi Jinping: Technocracy, centralization, and policy innovation. *China Review*, 23(1), 35–58.
- Zheng, X., & Liu, C. (2023). Made in China 2025 and its impact on global technological competition. *Asian Economic Policy Review*, 18(2), 210–228.
- RAND Corporation. (2022). *China's civil-military fusion strategy: Drivers and implications for the United States*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Kania, J., & Medeiros, E. (2022). Intelligentized warfare and the future of the People's Liberation Army. *China Brief (Jamestown Foundation)*, 22(4), 15–22.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). New York, NY: Psychology Press.
- Heifetz, R. A. (1994). *Leadership without easy answers*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lykke, A. F. (1989). Defining military strategy. *Military Review*, 69(5), 2–8.
- Kania, J. (2022). In military–civil fusion, China is learning lessons from the U.S. *Jamestown Foundation China Brief*, 22(3), 12–19.
- Medeiros, E. S. (2023). China's defense modernization and the transformation of the global military balance. *Brookings Institution Policy Brief*, March 2023.
- Suryana, A., & Panggabean, B. (2024). Transformasi digital pertahanan Indonesia menuju 2045. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(2), 77–98.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- State Council of the People's Republic of China. (2016). *Innovation-driven development strategy outline*. Beijing: State Council.
- Chase, M. (2022). China's civil–military integration strategy and PLA reforms. *Survival: Global Politics and Strategy*, 64(4), 95–118.
- Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China. (2021). *National Science and Technology Talent Development Plan (2021–2030)*. Beijing: Ministry of Science and Technology.
- Widodo, A. (2023). Integrasi teknologi C4ISR dalam modernisasi sistem pertahanan nasional. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 10(1), 45–62.
- Susilo, T. (2024). Kepemimpinan strategis TNI di era transformasi digital. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 55–70.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

